ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 1551 - 1558
Volume 5 Nomor 5 Tahun 2026

Penguatan Ekonomi Pertahanan melalui Penguatan Keimigrasian pada Pos Lintas Batas Negara Indonesia: Analis SWOT

Informasi Naskah

Ibnu Setyawan[1]
Yudi Sutrasna[2]
Heru Prasetyo[3]

Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

ibnusetyawan01@gmail.ac.id

Abstrak

Pengelolaan perbatasan Indonesia semakin dituntut untuk mencapai dua tujuan secara bersamaan, yakni menjaga kedaulatan dan keamanan serta memastikan mobilitas manusia dan barang yang legal dapat berlangsung secara cepat, pasti, dan produktif. Artikel ini mengembangkan kajian mengenai penguatan ekonomi pertahanan melalui fungsi keimigrasian pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan menggunakan analisis SWOT, IFAS, dan EFAS. Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan memanfaatkan dokumen kebijakan, data pemerintah, serta artikel ilmiah mutakhir. Data pemerintah menunjukkan bahwa pada 2024 sebanyak 13 PLBN mencatat 1.771.192 perlintasan orang dan nilai ekspor sekitar Rp1,159 triliun, sedangkan pada 2025, ketika cakupan telah mencapai 15 PLBN, lebih dari 2,4 juta orang melintas dengan nilai perdagangan Rp13,5 triliun. Perbedaan cakupan tersebut harus diperhatikan sehingga kedua angka tidak diperlakukan sebagai seri pertumbuhan yang sepenuhnya sebanding. Pada 2026, pemerintah mempertahankan 15 PLBN yang telah beroperasi dan menetapkan pagu operasional Rp86 miliar. Analisis menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada jaringan PLBN terpadu, mandat hukum keimigrasian, data perjalanan, dan perkembangan digitalisasi. Kelemahannya mencakup keterbatasan SDM, kesenjangan infrastruktur, konektivitas, integrasi data, serta koordinasi lintas instansi. Peluang terbesar berasal dari pertumbuhan perdagangan formal, digitalisasi, pusat pertumbuhan perbatasan, dan penguatan ekonomi lokal, sementara ancaman utama adalah jalur tidak resmi, perdagangan orang, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan ketimpangan manfaat pembangunan. Skor IFAS 2,68 dan EFAS 2,75 mengarahkan strategi pada kuadran SO. Artikel merekomendasikan ekosistem secure trade and secure mobility melalui integrasi data CIQS, pemeriksaan berbasis risiko, modernisasi infrastruktur, penguatan kapasitas petugas, patroli terpadu, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan.

Kata Kunci:
Ekonomi Pertahanan, Keimigrasian, PLBN, Keamanan Perbatasan, SWOT, Ketahanan Ekonomi.

Abstract

Indonesia's border governance is increasingly required to pursue sovereignty and security while simultaneously facilitating lawful, predictable, and productive cross-border mobility. This article develops a defense-economics perspective on immigration functions at National Border Posts (PLBN) using SWOT, IFAS, and EFAS analysis. The study applies a qualitative-descriptive approach based on government documents, operational data, policy reports, and recent academic literature. Government data indicate that 13 PLBN recorded 1,771,192 person crossings and approximately IDR 1.159 trillion in exports in 2024, while in 2025 more than 2.4 million people crossed through 15 operating PLBN with trade valued at IDR 13.5 trillion. Because the number of covered PLBN differs, these figures should not be interpreted as a fully comparable growth series. In 2026, 15 PLBN remained operational and the government allocated IDR 86 billion for operational continuity. The SWOT analysis identifies integrated PLBN infrastructure, immigration legal authority, travel data, and digitalization as key strengths; human-resource gaps, uneven infrastructure and connectivity, fragmented data integration, and inter-agency coordination as weaknesses; formal trade, digitalization, border growth centers, and local economic development as opportunities; and irregular routes, trafficking, smuggling, transnational crime, and unequal development benefits as threats. With IFAS 2.68 and EFAS 2.75, the strategic position favors an SO strategy. The study recommends a secure trade and secure mobility ecosystem based on CIQS data integration, risk-based inspection, infrastructure modernization, personnel capability, joint patrols, and border-community economic empowerment.

Keyword:
Defense Economics, Immigration, PLBN, Border Security, SWOT, Economic Resilience.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perbatasan negara tidak lagi tepat dipahami hanya sebagai garis yang harus dijaga, melainkan sebagai ruang tempat kedaulatan, mobilitas, perdagangan, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat saling berinteraksi. Pergeseran cara pandang ini terlihat dalam kebijakan pembangunan PLBN yang menggabungkan fungsi pemeriksaan lintas batas dengan pembangunan kawasan. Literatur terbaru bahkan menunjukkan adanya transformasi dari pendekatan security border menuju welfare border, meskipun logika keamanan masih kuat dalam kelembagaan dan pembangunan fisik (Muchsin & Maharudin, 2026).

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Dalam perspektif ekonomi pertahanan, keamanan bukan sekadar biaya yang harus ditanggung negara. Keamanan yang efektif dapat menjadi prasyarat bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi, karena mengurangi ketidakpastian, melindungi aset dan manusia, serta menjaga agar perdagangan berlangsung melalui saluran formal. Literatur ekonomi pertahanan Indonesia menempatkan hubungan pertahanan dan pembangunan ekonomi sebagai hubungan yang saling menguatkan, terutama ketika belanja dan kapabilitas negara diarahkan untuk menghasilkan ketahanan jangka panjang (Nainggolan et al., 2026). Dengan kerangka tersebut, fungsi keimigrasian pada PLBN dapat dibaca sebagai investasi kapabilitas negara: pemeriksaan yang akurat mencegah ancaman, sedangkan proses yang efisien mengurangi friksi perdagangan dan mobilitas.

Konteks aktual memperlihatkan skala aktivitas yang tidak kecil. Pada 2024, 13 PLBN mencatat 1.771.192 perlintasan orang dengan nilai ekspor sekitar Rp1,159 triliun. Pada 2025, pemerintah melaporkan lebih dari 2,4 juta orang melintas melalui 15 PLBN dan nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun (Badan Nasional Pengelola Perbatasan [BNPP], 2025; Kantor Staf Presiden [KSP], 2026). Pada saat yang sama, pemerintah telah memiliki 15 PLBN aktif, sementara tiga PLBN lainnya masih berada dalam proses penyelesaian. Pagu operasional PLBN pada 2026 ditetapkan sebesar Rp86 miliar (KSP, 2026).

Angka tersebut menunjukkan bahwa PLBN telah menjadi simpul ekonomi sekaligus simpul risiko. Di satu sisi, meningkatnya mobilitas menciptakan peluang bagi perdagangan, pariwisata, dan jasa. Di sisi lain, semakin tinggi arus orang dan barang, semakin besar kebutuhan untuk menyaring risiko tanpa menciptakan antrean dan biaya transaksi yang berlebihan. Studi Araryaputra et al. (2026) menunjukkan bahwa perlintasan ilegal di Kalimantan Barat masih memanfaatkan jalur tidak resmi dan perantara, sementara sinergi lintas instansi belum sepenuhnya didukung sistem monitoring dan SOP yang terpadu.

Penelitian mengenai PLBN Skouw memperlihatkan sisi lain dari persoalan tersebut. Pembangunan PLBN dapat memperkuat perdagangan lintas batas, pariwisata, dan aktivitas sosial, tetapi manfaat ekonomi tidak otomatis tersebar secara merata. Kari et al. (2026) menunjukkan adanya gejala differential inclusion, yaitu kesempatan yang secara formal terbuka tetapi secara substantif lebih mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki modal, jaringan, dan akses. Temuan ini penting karena ekonomi pertahanan tidak cukup dinilai dari besarnya volume perdagangan; ketahanan juga bergantung pada siapa yang memperoleh manfaat dan apakah masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini bertujuan: (1) memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman penguatan keimigrasian pada PLBN; (2) menilai posisi strategis melalui IFAS dan EFAS; (3) menghubungkan fungsi keimigrasian dengan ekonomi pertahanan; dan (4) merumuskan strategi yang dapat mempertemukan keamanan, fasilitasi mobilitas, perdagangan formal, serta ketahanan ekonomi masyarakat perbatasan.

Ekonomi pertahanan dan ketahanan ekonomi

Ekonomi pertahanan dalam artikel ini tidak dibatasi pada pengeluaran militer. Konsep yang digunakan lebih luas, yakni kemampuan negara mengalokasikan sumber daya dan membangun institusi yang membuat kegiatan ekonomi tetap berjalan ketika menghadapi gangguan keamanan, geopolitik, kejahatan lintas negara, maupun guncangan eksternal. Dalam kerangka ini, infrastruktur perbatasan dan kapasitas pemeriksaan merupakan bagian dari modal strategis negara. Kajian Nainggolan et al. (2026) menegaskan bahwa pertahanan, ekonomi, dan stabilitas ekonomi memiliki hubungan yang erat, meskipun hasilnya bergantung pada kualitas kebijakan, kapasitas domestik, dan inovasi.

Ketahanan ekonomi juga memiliki dimensi lokal. Setiono dan Giri (2025), melalui studi Nunukan, menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap pasar Malaysia dapat menjadi kerentanan apabila diversifikasi produksi domestik, logistik dalam negeri, perdagangan formal, dan koordinasi kelembagaan tidak diperkuat. Dengan demikian, keberhasilan PLBN seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah pelintas yang dapat diperiksa, tetapi juga dari kemampuan PLBN mengurangi biaya transaksi legal dan memperbesar nilai tambah yang tertahan di wilayah Indonesia.

Keimigrasian sebagai fungsi keamanan dan fasilitasi

Fungsi keimigrasian berada pada titik temu antara kontrol dan fasilitasi. Arifin et al. (2024) menunjukkan bahwa tata kelola migrasi Indonesia masih menghadapi kompleksitas kelembagaan dan tantangan baru seperti mobilitas tidak teratur, kejahatan lintas negara, dan modus kejahatan berbasis teknologi. Karena itu, pendekatan yang hanya menambah intensitas pemeriksaan manual berisiko menghasilkan beban kerja tinggi tanpa peningkatan kemampuan deteksi yang sepadan.

Pendekatan yang lebih adaptif adalah risk-based border management. Purnomo et al. (2026) mengembangkan kerangka Selective Risk-Based Resilience yang menekankan pengelompokan risiko dan penyesuaian kebijakan terhadap kapasitas institusi serta konteks lokal. Pada level operasional PLBN, prinsip

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

tersebut dapat diterjemahkan menjadi fasilitasi tinggi bagi pelintas berisiko rendah dan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelintas berisiko tinggi.

Digitalisasi juga memperluas kapasitas tersebut. Sistem Border Control Management (BCM) pada PLBN Skouw dilaporkan mendukung pemeriksaan dan pemantauan melalui integrasi data biometrik serta pengenalan wajah (Basna et al., 2025). Sementara itu, All Indonesia mengintegrasikan deklarasi kedatangan untuk keimigrasian, bea dan cukai, kesehatan, dan karantina dalam satu ekosistem digital. Pada 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menargetkan modernisasi sarana pemeriksaan termasuk pengembangan autogate di sejumlah TPI dan PLBN.

Perbatasan sebagai ruang pertumbuhan ekonomi

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa pembangunan perbatasan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi sekaligus ketimpangan baru. Studi Kari et al. (2026) pada Skouw menemukan intensifikasi perdagangan, munculnya wisata perbatasan, dan kegiatan budaya lintas batas setelah pembangunan PLBN. Namun, distribusi manfaat belum merata. Karena itu, strategi ekonomi pertahanan harus menggabungkan keamanan dengan kebijakan rantai nilai lokal, pemberdayaan UMKM, dan akses masyarakat terhadap pasar.

Studi Fkun dan Pareira (2026) mengenai Motaain juga menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan kesiapan lokal. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi optimal jika kapasitas pelaku lokal, konektivitas, kelembagaan, dan mekanisme implementasi belum siap. Argumen ini memperkuat kebutuhan untuk menempatkan keimigrasian sebagai salah satu komponen dalam ekosistem kawasan, bukan sebagai unit administratif yang berdiri sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis SWOT. Unit analisis adalah fungsi keimigrasian pada PLBN Indonesia dalam ekosistem Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen BNPP, Kantor Staf Presiden, Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Imigrasi, DPR RI, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal yang terbit terutama pada 2024–2026.

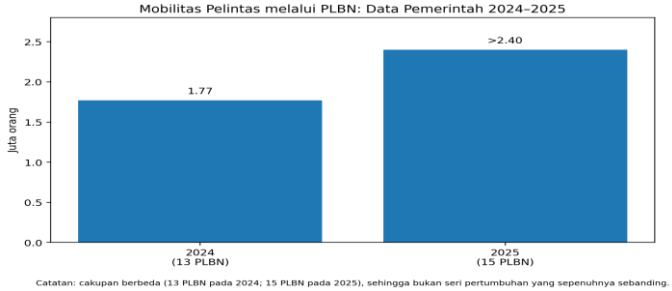
Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan. Kedua, mengidentifikasi faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Ketiga, menyusun IFAS dan EFAS menggunakan pembobotan analitis. Keempat, memadukan faktor tersebut ke dalam strategi SO, WO, ST, dan WT. Bobot dan rating bukan hasil survei statistik kepada responden, melainkan penilaian analitis berdasarkan intensitas isu dan dukungan dokumen. Oleh sebab itu, skor digunakan sebagai alat pemetaan prioritas, bukan bukti hubungan kausal.

Untuk menjaga ketepatan interpretasi data, angka 2024 dan 2025 tidak dihitung sebagai laju pertumbuhan tahunan langsung karena cakupan berubah dari 13 menjadi 15 PLBN. Data nasional BPS 2025 digunakan hanya sebagai konteks makro, bukan sebagai pengganti data perdagangan PLBN. Pendekatan ini dipilih agar tidak mencampurkan statistik nasional dengan statistik simpul perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan aktivitas PLBN

Data pemerintah memperlihatkan bahwa aktivitas lintas batas memiliki skala yang cukup besar dan meningkat dalam cakupan layanan. Pada 2024, 13 PLBN mencatat 1.771.192 perlintasan orang dan ekspor sekitar Rp1,159 triliun. Pada 2025, setelah jaringan aktif mencapai 15 PLBN, lebih dari 2,4 juta orang melintas dan nilai perdagangan mencapai Rp13,5 triliun (KSP, 2026). Perbedaan cakupan PLBN perlu ditekankan: peningkatan jumlah pelintas dan perdagangan tersebut menunjukkan perluasan dan intensifikasi aktivitas, tetapi tidak dapat dianggap sebagai pertumbuhan murni dari unit observasi yang identik.



Gambar 1. Perbandingan indikator aktivitas PLBN 2024–2025.
Sumber: BNPP (2025) dan KSP (2026); diolah penulis.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Catatan visual: data 2024 mencakup 13 PLBN, sedangkan data 2025 mencakup 15 PLBN; grafik menunjukkan skala aktivitas dan bukan pertumbuhan tahunan yang sepenuhnya sebanding. Dari perspektif ekonomi pertahanan, implikasinya cukup jelas. Setiap kenaikan mobilitas legal memperbesar nilai ekonomi yang dapat difasilitasi, tetapi sekaligus memperbesar permukaan risiko. Pemeriksaan yang terlalu longgar meningkatkan risiko keamanan; pemeriksaan yang terlalu lambat meningkatkan biaya waktu dan transaksi. Karena itu, kapasitas keimigrasian perlu bergerak dari model pemeriksaan seragam menuju model berbasis risiko.

Data musiman 2026 menguatkan kebutuhan tersebut. Pada H-4 Idulfitri 1447 H, BNPP mencatat 5.436 pelintas di 15 PLBN dan nilai ekspor Rp2,52 miliar dalam satu hari. Angka tersebut bukan indikator tahunan, tetapi berguna sebagai ilustrasi bahwa beban layanan dapat melonjak pada periode tertentu sehingga kapasitas petugas, teknologi, dan koordinasi harus memiliki elastisitas operasional (BNPP, 2026).

Kekuatan internal

Pertama, Jaringan PLBN terpadu menyediakan titik pemeriksaan resmi yang menggabungkan kepentingan kedaulatan, pelayanan, dan perdagangan. Kedua, Mandat hukum keimigrasian memberi dasar formal bagi pemeriksaan dokumen, pengawasan orang, penolakan atau pencegahan terhadap risiko tertentu, dan penegakan hukum. Ketiga, Data perjalanan, biometrik, dan digitalisasi membuka peluang pengembangan risk profiling serta deteksi pola mobilitas. Keempat, Integrasi CIQS menciptakan peluang koordinasi yang lebih kuat karena pemeriksaan manusia, barang, kesehatan, karantina, dan keamanan dapat ditempatkan dalam satu arsitektur proses.

Kelemahan internal

Kelemahan utama terletak pada kapasitas operasional. Kajian DPR RI yang menjadi basis naskah awal menyoroti kekurangan SDM, akses transportasi, sarana-prasarana, dan insentif penempatan petugas. Di beberapa lokasi, beban pelintas dapat tinggi sementara jumlah petugas per shift terbatas. Studi 2026 tentang PLBN Kalimantan Barat juga menunjukkan bahwa keterbatasan personel, pengawasan jalur tidak resmi, dan ketimpangan infrastruktur masih menghambat efektivitas fungsi keimigrasian (Syahputra et al., 2026).

Kelemahan berikutnya adalah ketergantungan pada kualitas jaringan dan perangkat. Digitalisasi tidak otomatis menghasilkan layanan cepat apabila konektivitas, listrik, perangkat pemeriksaan, dan kompetensi operator tidak memiliki tingkat keandalan yang sama. Karena itu, investasi digital di PLBN seharusnya dipandang sebagai paket kapabilitas yang terdiri dari perangkat, jaringan redundan, keamanan siber, SDM, SOP, dan pemeliharaan.

Analisis IFAS

Table 1. Hasil Analisis IFAS

Faktor internal	Bobot	Rating	Skor	Interpretasi
Jaringan PLBN dan mandat CIQS	0,15	4	0,60	Fondasi kelembagaan dan fasilitas sudah tersedia.
Posisi Imigrasi sebagai gatekeeper	0,13	4	0,52	Kontrol identitas dan mobilitas merupakan fungsi kunci keamanan.
Data perjalanan dan digitalisasi	0,12	3	0,36	Mendukung analitik risiko dan layanan yang lebih cepat.
Keterbatasan SDM dan kompetensi	0,18	2	0,36	Beban kerja tinggi dan penempatan perbatasan kurang menarik.
Keterbatasan sarana dan konektivitas	0,17	2	0,34	Perangkat, jaringan, listrik, dan akses tidak merata.
Integrasi data dan koordinasi belum optimal	0,15	2	0,30	SOP dan monitoring bersama belum seragam.
Dominasi belanja dukungan manajemen	0,10	2	0,20	Belanja modal dan outcome lokal belum konsisten.
Total	1,00		2,68	

Skor IFAS 2,68 berada di atas titik tengah 2,50. Ini menunjukkan bahwa fondasi internal relatif memadai, tetapi kekuatan tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi kapabilitas operasional. Dengan kata lain, masalah utama bukan ketiadaan institusi, melainkan kualitas dan konsistensi eksekusinya.

Peluang eksternal

Pertama, Pertumbuhan mobilitas dan perdagangan formal meningkatkan basis ekonomi yang dapat dilayani melalui jalur resmi. Kedua, Transformasi digital dan risk-based screening memungkinkan pemeriksaan lebih selektif tanpa mengorbankan keamanan. Ketiga, Agenda pembangunan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan membuka ruang integrasi PLBN dengan UMKM, logistik, pariwisata, dan pasar lokal. Keempat, Kerja sama CIQS dan kerja sama lintas negara dapat memperbaiki pertukaran informasi serta respons terhadap kejahatan lintas batas. Kelima, Perhatian kebijakan terhadap ketahanan ekonomi memberi legitimasi untuk menghubungkan indikator keamanan dengan indikator kesejahteraan.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Ancaman eksternal

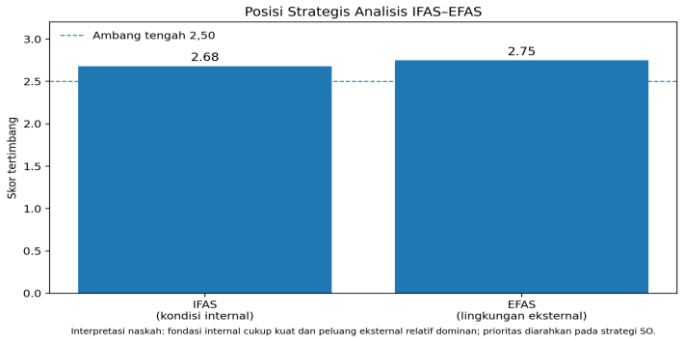
Ancaman perbatasan memiliki karakter adaptif. Jalur tikus, penyelundupan, perdagangan orang, pemalsuan dokumen, kejahatan siber, dan jaringan broker dapat berpindah ketika pengawasan di satu titik diperketat. Araryaputra et al. (2026) menunjukkan bahwa operasi gabungan meningkatkan deteksi pelintas ilegal sebesar 27% dibandingkan patroli terpisah dalam periode enam bulan yang mereka teliti, tetapi koordinasi, sistem monitoring, dan SOP terpadu masih menjadi kendala.

Ancaman lain bersifat struktural, yaitu ketergantungan ekonomi pada negara tetangga. Ketika masyarakat perbatasan memperoleh akses pasar, pasokan, dan kesempatan kerja yang jauh lebih mudah dari negara tetangga, jalur formal Indonesia dapat kehilangan sebagian nilai tambah. Karena itu, kebijakan keamanan yang tidak diikuti penguatan produksi lokal dapat menghasilkan kontrol yang lebih ketat tanpa memperbaiki ketahanan ekonomi.

Analisis EFAS

Table 2. Hasil Analisis EFAS

Faktor eksternal	Bobot	Rating	Skor	Interpretasi
Pertumbuhan mobilitas legal dan perdagangan	0,18	4	0,72	Volume aktivitas memberi basis bagi fasilitasi formal.
Pusat pertumbuhan dan agenda pembangunan perbatasan	0,14	3	0,42	Memungkinkan integrasi program ekonomi dan keamanan.
Digitalisasi dan pengawasan berbasis risiko	0,13	3	0,39	Mendukung efisiensi dan early warning.
Kemitraan CIQS dan kerja sama internasional	0,12	3	0,36	Mendorong data sharing dan prosedur bersama.
Jalur tidak resmi dan kejahatan transnasional	0,17	2	0,34	Mengganggu kedaulatan dan ekonomi formal.
TPPO serta pekerja migran nonprosedural	0,11	2	0,22	Menimbulkan kerugian sosial-ekonomi.
Ketergantungan ekonomi pada negara tetangga	0,08	2	0,16	Mengurangi retensi nilai tambah domestik.
Risiko siber dan gangguan infrastruktur	0,07	2	0,14	Menghambat kontinuitas layanan.
Total	1,00		2,75	



Gambar 2. Posisi IFAS–EFAS. Sumber: diolah penulis berdasarkan pembobotan analitis.

Interpretasi: skor IFAS 2,68 dan EFAS 2,75 berada di atas titik tengah 2,50 sehingga strategi SO menjadi prioritas. Skor EFAS 2,75 juga berada di atas titik tengah. Artinya, lingkungan eksternal menyediakan peluang yang relatif lebih besar dibandingkan ancaman jika negara mampu mengelola kapasitas internalnya. Kombinasi IFAS 2,68 dan EFAS 2,75 mengarahkan strategi pada pendekatan SO: menggunakan kekuatan kelembagaan dan teknologi untuk menangkap peluang perdagangan, mobilitas, dan pertumbuhan kawasan.

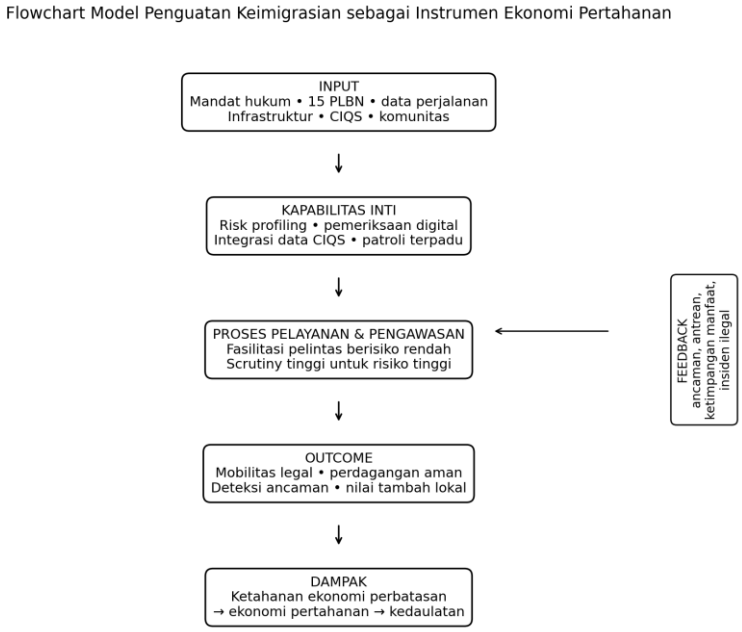
Matriks SWOT dan strategi prioritas

Table 3. Matriks SWOT dan strategi prioritas

Strategi	Rumusan	Program prioritas
SO	Menggunakan jaringan PLBN, data perjalanan, dan CIQS untuk membangun ekosistem secure trade and secure mobility.	Single-window data CIQS; risk profiling; jalur cepat untuk risiko rendah; pusat informasi perdagangan legal.
WO	Memanfaatkan agenda pembangunan perbatasan dan digitalisasi untuk menutup kesenjangan SDM, sarpras, dan konektivitas.	Tunjangan afirmatif; pelatihan intelijen/data; jaringan redundan; modernisasi perangkat pemeriksaan.
ST	Menggunakan mandat keimigrasian dan patroli terpadu untuk menekan kejahatan lintas negara.	Patroli berbasis hotspot; pertukaran data; SOP penanganan TPPO dan penyelundupan.
WT	Mengurangi kerentanan kelembagaan dan ekonomi lokal terhadap gangguan eksternal.	Audit kesiapan PLBN; business continuity plan; pemberdayaan UMKM; pelaporan berbasis komunitas.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Model strategi: secure trade and secure mobility



Gambar 3. Model alur penguatan keimigrasian sebagai instrumen ekonomi pertahanan. Sumber: diolah penulis.

Alur menunjukkan hubungan input kelembagaan → kapabilitas keimigrasian → mobilitas aman → ketahanan ekonomi.

Model pada Gambar 3 menempatkan keimigrasian sebagai penghubung antara input negara dan outcome ekonomi. Mandat hukum, jaringan PLBN, data, infrastruktur, dan komunitas merupakan modal awal. Modal tersebut harus diubah menjadi kapabilitas melalui risk profiling, pemeriksaan digital, integrasi CIQS, dan patroli terpadu. Kapabilitas kemudian menghasilkan dua keluaran sekaligus: mobilitas legal yang lebih lancar dan kemampuan deteksi ancaman yang lebih baik. Keduanya berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi apabila manfaat perdagangan juga terhubung dengan pelaku ekonomi lokal.

Prinsip operasional yang paling relevan adalah 'high facilitation for low-risk movements, high scrutiny for high-risk movements'. Prinsip ini menghindari dua ekstrem: membuka perbatasan secara berlebihan atau memperlakukan seluruh pelintas sebagai risiko tinggi. Pendekatan serupa konsisten dengan literatur border governance yang menekankan hubungan antara formalitas, fasilitasi, keamanan, profiling berbasis data, dan penilaian risiko (Arifin et al., 2024).

Implikasi kebijakan dan indikator kinerja

Penguatan keimigrasian perlu dipindahkan dari logika output administratif menuju outcome pertahanan-ekonomi. Jumlah pemeriksaan dan penindakan tetap penting, tetapi tidak cukup. Pemerintah membutuhkan seperangkat indikator gabungan yang menunjukkan apakah keamanan meningkat tanpa menghambat kegiatan legal.

Table 4. Implikasi kebijakan dan indikator kinerja

Dimensi	Indikator	Arah kinerja
Keamanan	Deteksi pelintas berisiko; kasus TPPO/penyelundupan; waktu respons insiden	Menurun/meningkat sesuai arah indikator
Fasilitasi	Waktu pemeriksaan; waktu antrean; persentase proses digital	Lebih cepat dan stabil
Perdagangan	Nilai perdagangan formal; jumlah pelaku usaha formal; kepatuhan dokumen	Meningkat
Ekonomi lokal	Nilai tambah komoditas lokal; UMKM pemasok; pekerjaan lokal	Meningkat
Ketahanan	Ketergantungan pasokan eksternal; kontinuitas operasi PLBN; pemulihan pascagangguan	Lebih resilien
Kolaborasi	Pertukaran data CIQS; latihan gabungan; SOP bersama	Meningkat dan terukur

Target numerik jangka menengah sebaiknya ditetapkan setelah baseline tiap PLBN tersedia. Pendekatan ini lebih aman secara metodologis daripada menetapkan angka target yang seragam untuk seluruh PLBN, karena karakteristik Entikong, Motaain, Skouw, Serasan, dan PLBN lainnya berbeda dari sisi volume, geografi, ancaman, dan struktur ekonomi lokal.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

Prioritas implementasi 2026–2029

Table 5. Prioritas implementasi 2026–2029

Prioritas	Program	Arah tindakan	Outcome
1	Integrasi data CIQS	Bangun pertukaran data dan dashboard risiko lintas instansi.	Risiko terdeteksi lebih dini; duplikasi pemeriksaan berkurang.
2	Risk-based inspection	Segmentasi pelintas dan jalur pemeriksaan berdasarkan profil risiko.	Waktu layanan turun tanpa menurunkan kualitas pengawasan.
3	Modernisasi sarpras	Autogate, biometrik, jaringan redundan, perangkat pemeriksaan, pemeliharaan.	Reliabilitas pemeriksaan dan kontinuitas operasi meningkat.
4	SDM dan insentif	Pelatihan analitik data/intelijen serta afirmasi penempatan perbatasan.	Kapabilitas petugas dan retensi SDM meningkat.
5	Patroli terpadu	Hotspot mapping, SOP gabungan, dan pelaporan insiden terpadu.	Jalur ilegal dan jaringan kriminal lebih cepat terdeteksi.
6	Rantai nilai lokal	UMKM, logistik, produk unggulan, pasar perbatasan, dan wisata.	Nilai tambah lebih banyak tertahan di wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Penguatan ekonomi pertahanan melalui keimigrasian pada PLBN pada dasarnya merupakan persoalan mengelola trade-off antara keamanan dan kelancaran mobilitas. Data 2024–2026 menunjukkan bahwa PLBN telah berkembang menjadi simpul mobilitas dan perdagangan yang strategis. Namun, perbedaan cakupan statistik antarperiode mengingatkan bahwa evaluasi kinerja harus menggunakan baseline yang konsisten pada level masing-masing PLBN.

Analisis SWOT menempatkan kondisi internal pada skor 2,68 dan lingkungan eksternal pada skor 2,75. Posisi ini mendukung strategi SO, yaitu memanfaatkan jaringan PLBN, mandat keimigrasian, data perjalanan, dan digitalisasi untuk menangkap peluang perdagangan formal dan pertumbuhan kawasan. Strategi tersebut hanya akan efektif apabila kelemahan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, konektivitas, dan integrasi data diperbaiki secara bersamaan.

Implikasi paling penting adalah perlunya mengubah ukuran keberhasilan. Keimigrasian pada PLBN tidak seharusnya dinilai semata-mata dari banyaknya orang yang diperiksa atau ditindak. Ukuran keberhasilan harus mencakup keamanan, kecepatan layanan, kepatuhan dokumen, pertumbuhan perdagangan legal, nilai tambah lokal, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat dan negara memulihkan diri dari gangguan. Dengan pendekatan tersebut, PLBN dapat berfungsi sebagai instrumen kedaulatan sekaligus instrumen ketahanan ekonomi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan pembobotan SWOT analitis. Karena itu, skor IFAS dan EFAS belum dapat dianggap sebagai ukuran statistik populasi. Penelitian lanjutan perlu menguji model ini melalui survei dan wawancara kepada petugas CIQS, pelaku usaha, pekerja lintas batas, pemerintah daerah, serta masyarakat perbatasan. Penelitian berikutnya juga disarankan membangun panel data per-PLBN agar perubahan waktu pemeriksaan, volume perdagangan, insiden keamanan, dan indikator ekonomi lokal dapat dianalisis secara kuantitatif.

REFERENSI

Araryaputra, A., Maulidia, H., & Ryanindityo, M. (2026). Strategi penguatan fungsi keimigrasian melalui sinergi lintas sektor: Analisis penanganan perlintasan ilegal di perbatasan Kalimantan Barat–Malaysia. Jurnal Bina Ilmu Cendekia, 6(2), 133–143. https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850

Arifin, R., Hanita, M., & Runturambi, A. J. S. (2024). Maritime border formalities, facilitation and security nexus: Reconstructing immigration clearance in Indonesia. Marine Policy, 163, Article 106101. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106101

Arifin, R., Hanita, M., Runturambi, A. J. S., & Zulfa, E. A. (2024). Unveiling Indonesia's migration and border governance: Challenges and imperatives post-pandemic. Social Sciences & Humanities Open, 10, Article 101202. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101202

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2025). Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan. https://eprints.ipdn.ac.id/20105/

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2026). BNPP RI catat 5.436 pelintas di 15 PLBN terpadu pada H-4 Idulfitri 1447 H, Entikong paling padat. https://bnpp.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2026). Statistik perdagangan luar negeri Indonesia ekspor 2025. https://www.bps.go.id/

Basna, L. H., Wirdhiningsih, V., & Widayat, W. (2025). Evaluasi Border Control Management PLBN Skouw

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

dalam menegakkan fungsi pengawasan dan keamanan keimigrasian. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(4). https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.31453

Fkun, E., & Pareira, M. S. (2026). Policy-implementation gaps and local readiness in economic development acceleration: The Motaain border area, Belu Regency. Jurnal Bina Praja, 18(2), 417–436. https://doi.org/10.21787/jbp.18.2026.2868

Kantor Staf Presiden. (2026, April 15). Pemerintah tegaskan komitmen pertahanan melalui pembangunan 15 PLBN dan penegasan batas Sebatik. https://www.ksp.go.id/

Kari, S. A. A. F., Idris, U., & Flassy, M. (2026). Socioeconomic changes post Indonesia-Papua New Guinea cross-border development. Frontiers in Sociology, 11, Article 1794970. https://doi.org/10.3389/fsoc.2026.1794970

Muchsin, M., & Maharudin, D. (2026). Dari security border ke welfare border: Systematic literature review atas transformasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia. Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(1), 323–341. https://doi.org/10.52423/welvaart.v7i1.133

Nainggolan, B. N. P., Priyanto, Suwito, Navalino, R. D. A., & Saputro, G. E. (2026). National defense and economic development: Examining the relationship between national defense capability, defense economics, and economic stability. The International Journal of Education Management and Sociology, 5(1). https://doi.org/10.58818/ijems.v5i1.302

Okterano, Y., & Susetyo, H. (2025). The nexus of FTFs counterterrorism strategy, immigration control, and border security through Indonesia's migration policy. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 19(1), 49–68. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.49-68

Purnomo, A. S., Hanita, M., Tairas, D. R., & Ong, S. (2026). From border control to policy innovation: Rethinking immigration through the selective risk-based resilience framework in Indonesia. Public Policy and Administration, 24(4), 634–650. https://doi.org/10.13165/VPA-25-24-4-08

Setiono, K. Y., & Giri, J. R. (2025). Strengthening Nunukan's border economy for national resilience at the Indonesia-Malaysia frontier. Jurnal Lemhannas RI, 13(3), 412–426. https://doi.org/10.55960/jlri.v13i3.1427

Syahputra, A. D. N., Bagas, & Saragih, D. A. (2026). Analisis komprehensif permasalahan keimigrasian pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat dalam rangka optimalisasi pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan. Bhirawa Law Journal, 7(1), 13–24. https://doi.org/10.26905/blj.v7i1.17041